



# **RENJA**

## **Rencana Kerja (PERUBAHAN)**



**SEKRETAIAT DAERAH  
KABUPATEN BOALENO**

**TAHUN 2018**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Allah SWT atas karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) **Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018** ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja (RENJA) **Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018** ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018

Rencana Kerja (RENJA) merupakan suatu dokumen perencanaan yang nantinya akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran tanpa menutup kemungkinan di suatu saat akan berkembang ataupun berubah sesuai dengan perkembangan pembangunan yang ada di Kabupaten Boalemo khususnya di **\*Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang/Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan**

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini, masih terdapat beberapa kendala - kendala yang dihadapi namun berkat ketekunan semua staf akhirnya semua kendala dapat diatasi dan penyusunan Rencana Kerja ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu segala saran dan masukan akan sangat dibutuhkan dalam upaya penyempurnaan penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) **Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018** ini selanjutnya.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) **Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018** ini, diharapkan apa yang dituangkan didalamnya dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2018.

Sekian dan terima kasih

Boalemo, Oktober 2018  
**SEKRETARIS DAERAH**



**H.A ETANGO**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19650725 198801 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan RENJA .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD.....</b>	<b>4</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	4
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD II-16.....	5
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).....	8
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	8
<b>BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>9</b>
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	9
3.2. Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi.....	11
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	11
3.4. Program dan Kegiatan .....	11
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>14</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo adalah merupakan Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang diperoleh sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo untuk periode Tahun 2018. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo merupakan sebuah Dokumen Rencana Resmi Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Sekretariat Daerah khususnya, dan Pembangunan Daerah pada umumnya. Renja Sekretariat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem Perencanaan Daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Sekretariat Daerah sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah 2018 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2018 yang merupakan dokumen perencanaan tahun kedua 2017 - 2022 yang masuk dalam periodisasi RPJPD tahun 2011-2025.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka Renja Sekretariat Daerah ***Tahun 2018*** seharusnya memiliki keterpaduan dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Olehnya dalam penyusunan dokumen ini selain mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah 2017 - 2022. Selain itu, sebagai dokumen perencanaan sektoral daerah di **\*Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah**, dalam penyusunan Renja **\*Sekretariat Daerah Tahun 2018** juga berpedoman pada **\*dokumen penunjang perencanaan opd**, sedangkan dalam hal pemanfaatan struktur ruang, penyusunan Renja memperhatikan dan mempedomani arahan spasial dalam RTRW Provinsi Gorontalo.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka **Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018** menyusun Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun Anggaran 2018.

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun penyusunan Rencana Kerja (RENJA) **Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018** disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2025
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.
19. Perda RPJMD 2017-2022

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo **Tahun 2018** adalah untuk menjaga sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman OPD dalam hal ini **Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018** dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan jasa pariwisata yang handal dan berdaya saing khususnya yang akan dilaksanakan tahun 2018.
- b. Sebagai pedoman **Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018** dalam penyusunan RKA – OPD Tahun 2018
- c. Sebagai tolok ukur OPD Sekreariat Daerah Kabupaten Boalemo dalam evaluasi penilaian kinerja dalam melaksanakan program pembangunan pada tahun 2018.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

- BAB I** Merupakan **Bab Pendahuluan** yang memuat hal-hal substansial penyusunan RENJA seperti Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan penyusunan, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** Merupakan **Bab Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu** yang memuat Evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III** Merupakan **Bab Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah** yang akan memuat Telaah terhadap kebijakan nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.
- BAB IV** Merupakan **Bab Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang** memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018** dalam kurun waktu 2018.
- BAB V** Merupakan **Bab Penutup**, yang memuat Catatan Penting, Kaidah-aidah Pelaksanaan, serta Rencana Tindak Lanjut.
- LAMPIRAN** Tabel-tabel yaitu Tabel T-C.29, Tabel T-C.30, Tabel T-C.31, Tabel T-C.32 dan Tabel T-C.33



## BAB II

### Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo tahun 2018 dan Capaian Renstra sebagai berikut :

1. Untuk program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
  - Rancangan Peraturan yang disampaikan ke DPRD sesuai SOP pada Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Ditargetkan adalah 24 Ranperda yang terealisasi 6 Ranperda dengan persentase 25 % disebabkan anggaran yang belum mencukupi karena masih ada kegiatan lain yang lebih prioritas untuk di danai.
  - Permasalahan Hukum Perdata yang dapat difasilitasi dengan baik pada Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kegiatan Koordinasi Kerja Sama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan. Target 4 masalah hukum perdata yang harus diselesaikan yang terealisasi 3 dengan persentase 75 %. Dikarenakan minimnya anggaran sehingga realisasi hanya mencapai 75 %.
  - Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Program Penataan Otonomi Baru, pada Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Ditargetkan 4 yang terealisasi 3,4559 dengan persentase 86,39 % dikarenakan anggaran yang belum mencukupi dalam menunjang kegiatan tersebut.
2. Untuk program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
  - Kebudayaan Adat Daerah yang dilestarikan pada program Pengembangan Nilai Budaya pada Kegiatan Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kerja Sama di Bidang Budaya. Yang ditargetkan 1 Kebudayaan Adat Daerah yang dilestarikan dan yang terealisasi 1 kegiatan Kebudayaan Adat Daerah yang dilestarikan adalah Kebudayaan Adat Gorontalo dengan persentase 100 % atau kategori memenuhi target.
  - Frekwensi Pengendalian dan Penyerapan APBD pada Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, yang ditargetkan 4 kegiatan yang terealisasi 4 kegiatan sehingga target 100 %.
  - Berita dan Informasi Daerah yang terpublikasikan melalui media Elektronik, media massa dalam satu tahun, pada program Kerja Sama Informasi dengan Mass Media pada kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah. Ditargetkan 1 hari 1 berita yang diliput sehingga mencapai 100 %.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo maka untuk Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, Bidang Administrasi Pemerintahan terdapat 6 (enam) Sasaran sesuai renstra Sekretariat Daerah 2017-2022) dan 13 (tiga belas) indikator kinerja yang akan diwujudkan sampai dengan akhir tahun perencanaan (Tahun 2022). Adapun penjelasan mengenai indikator tersebut adalah sebagai berikut:

### Sasaran 1

Terwujudnya Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Jumlah Rancangan Peraturan yang di sampaikan ke DPRD sesuai target RPJMD 2012-2018, untuk tahun 2018 ditargetkan sebanyak 24 (dua puluh empat) Ranperda, Realisasi Capaiannya sebanyak 6 (enam) Ranperda, sehingga untuk tahun 2018 ditargetkan 5 ranperda.

### Sasaran 2.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Hukum

Permasalahan Hukum Perdata yang dapat di Fasilitasi dengan baik sesuai target RPJMD 2012 – 2017, untuk tahun 2016 ditargetkan 100 % yaitu 4 Permasalahan hukum perdata yang harus diselesaikan, yang terealisasi 3 dengan persentase 75 %, sehingga untuk tahun 2018 ditargetkan 5 permasalahan hukum perdata yang dapat difasilitasi dengan baik.

### Sasaran 3

Meningkatnya Pelestarian budaya adat daerah

Meningkatnya Pelestarian budaya adat daerah sesuai target RPJMD 2012 – 2017, untuk tahun 2018 ditargetkan 1 budaya adat target 100 % yang harus dilestarikan, yang terealisasi 1 dengan persentase 100 %, sehingga untuk tahun 2019 dapat ditargetkan 1 budaya adat yang harus dilestarikan.

### Sasaran 4

Meningkatnya Kualitas Administrasi keuangan dan pembangunan

Frekwensi Pengendalian Penyerapan APBD sesuai target RPJMD 2012-2017, untuk tahun 2018 ditargetkan 4 kegiatan evaluasi penyerapan anggaran, yang terealisasi 4 kegiatan capaian 100 %, dan untuk tahun 2019 dapat ditargetkan 4 kegiatan.

### Sasaran 5

Meningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai target RPJMD 2012-2018 tahun 2018 ditargetkan Nilai LPPD 4, yang terealisasi 3,4559 dengan persentase Capaian 86,39 %, dan untuk tahun 2018 ditargetkan 2,6.

### Sasaran 6

Transparansi Penyebaran Informasi.

Jumlah berita dan Informasi Daerah yang terpublikasikan melalui media elektronik dan media massa sesuai target RPJMD 2012 – 2017 , untuk tahun 2018 ditargetkan 1 hari 1 berita yang diliput, yang terealisasi 1 hari 1 berita yang diliput dengan capaian persentase 100 %, dan untuk tahun 2019 ditargetkan 1 tahun 360 berita yang diliput.



## 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Koordinasi dan sinergi program antara Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo contoh : lintas OPD baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi serta dengan Kementerian Urusan/Bidang Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan Daerah) dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan dilaksanakan dalam bentuk koordinasi antara semua stake holder, dimana kegiatan ini dilaksanakan berupa Rapat koordinasi maupun rembuk OPD dengan lintas terkait yang telah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya usulan program dan kegiatan yang dihasilkan merupakan hasil aspirasi dari bawah yang kemudian dimasukan menjadi bahan usulan tahun berjalan maupun tahun akan datang.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo. yaitu :

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah:

- a. Kapasitas dan Kemampuan Sumber Daya Aparatur yang masih terbatas.
  - b. Minimnya Pemahaman Aparatur tentang Tupoksi karena sering dimutasi
  - c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya penegakkan hukum.
  - d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur dan masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan tertib administrasi.
  - e. Sarana dan Prasarana kantor yang belum memadai.
  - f. Keterbatasan anggaran.
3. Berdasarkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo yang telah diuraikan di atas, maka dampaknya terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai dengan misi pembangunan pada RPJMD 2017-2022 yaitu mewujudkan Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai, Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Cerdas, Mewujudkan Kabupaten Boalemo dalam Suasana Religius sesuai Misi Bupati Boalemo yang dijabarkan dalam RENSTRA OPD 2017-2022 (Rangkuman Penjelasan Tujuan, Sasaran, IKU OPD dan IKU Kabupaten)
  1. Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran IKU Sekretariat Daerah dan IKU Kabupaten untuk Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai, mewujudkan Kabupaten yang cerdas dan mewujudkan Kabupaten Boalemo dalam suasana religius antara lain adalah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam hal ini adalah pelayanan kepada masyarakat belum maksimal dan mempengaruhi kinerja Sekretaris Daerah apabila tidak ditunjang oleh Sumber Daya Aparatur yang memadai, Sarana dan Prasarana yang memadai serta ketersediaan anggaran.
  4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah antara lain :
    - 1. Tantangannya Adalah**

Sering terjadinya perubahan kebijaksanaan administrasi pembangunan.  
Masih rendahnya kemampuan dari pelaksana proyek sebagai pengelola proyek.  
Kurangnya dukungan atasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengelolaan proyek. Adanya tugas perbantuan diluar tupoksi.

**2. Peluangnya adalah :**

Makin terjaminnya suasana kondusif kinerja yang dilandasi.

Adanya persyaratan Sertifikasi Pengadaan Barangdan Jasa bagi pejabat Pembuat Komitment (PPK).

Adanya Peraturan dari Instansi lebih tinggi yang bersifat baku (Undang-undang, Keppres, dan Permendagri).

Semakin tersedianya informasi dan Teknologi (ITE) yang akan memudahkan aparat dalam mengakses hal-hal yang sifatnya sangat erat dengantupoksimasing-masing bagian.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritastahun yang direncanakan.

**2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Boalemo 2017 - 2022, sehingga RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo *Tahun 2018* juga merupakan RENJA kedua dalam tahapan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Periode 2017-2022. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur.
2. Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Program Kegiatan.
3. Perluadanya Penambahan Anggaran sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo 2017-2022, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Misi Pertama : Mewujudkan Kabupaten Boalemo Yang Damai**

###### ***Tujuan :***

1. Meningkatkan suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan pemerintahan.

###### ***Sasaran :***

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih disertai penerapan e-government.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan prima.

##### **2. Misi Kedua : Mewujudkan Kabupaten Boalemo Yang Cerdas.**

###### ***Tujuan :***

1. Meningkatkan Kualitas SDM

###### ***Sasaran :***

1. Meningkatnya Pelestarian Seni, Budaya, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

##### **3. Misi Keempat: Mewujudkan Kabupaten Boalemo Yang Religius.**

###### ***Tujuan :***

1. Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan Bagi Semua Pemeluk Agama.

###### ***Sasaran :***

1. Meningkatnya Aktivitas Peribadatan.
2. Mendorong Lembaga Pondok Pesantren mewujudkan Kota Santri.

### 3.2. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai dengan RPJMD 2017-2022 , dan rancangan awal RKPD 2018, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM / KEGIATAN
1	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD
	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>
	- Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah
	- Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Kepala Daerah.
	- Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah
	- Pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
3	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>
	Penyusunan Standar Satuan Harga
4	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.</b>
	- Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah

5.	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.</b>
	- Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik.
6	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.</b>
	- Pemberian Bantuan Hukum.
7.	<b>Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah.</b>
	- Program Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah dan Lembaga Pemerintah Daerah
8	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>
	- Koordinasi Kerja sama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
	- Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
	- Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
9	<b>- Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>
	- Fasiltasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah.
	- Fasilitas Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD)
	- Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten)
10	<b>Program Pelayanan Kedinasan Pemerintah Daerah</b>
	- Pelayanan Kedinasan Kesekretariatan

11.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
13	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	- <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
	- Kegiatan Penguatan Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara
	- Sosialisasi Penguatan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH)
	- Sosialisasi Kesejahteraan Bantuan Sosial Bagi Anggota Korpri.
	- Pelaksanaan Pembinaan Mental Rohani Melalui Ceramah Agama Bagi Anggota Korpri
14	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi</b>
	- Penyelenggaraan Pameran Investasi
15	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>



	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
	- Penunjang Kegiatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa
	- Pelatihan Aparat Desa/BPD
16	<b>Program Kerja Sama Informasi dengan Mass Media</b>
	- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
17	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>
	- Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
	- Penyusunan dan Evaluasi Standart Pelayanan.
18	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>
	- Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerja Sama diBidang Budaya
19	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>
	- Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini akan dibahas lebih detail dalam bentuk tabel berupa Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo** dalam kurun waktu 2018 sesuai target Renstra **Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo** 2017-2022, disajikan pada Tabel T-C.33 sebagaimana terlampir.

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan, sekaligus sebagai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

RENJA **Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo** Tahun 2018 ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada **Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo** Tahun 2018, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pelaksanaan program dan kegiatan **Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo** Tahun 2018 pada khususnya dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Gorontalo pada umumnya.

RENJA **Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo** Tahun 2018 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Pemerintahan Kabupaten Boalemo secara keseluruhan sebagai wujud pengabdian pada nusa dan bangsa.

Sekian dan terima kasih

Boalemo, Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH**



**H.A ETANGO**

**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo s/d Tahun 2017**  
**Kabupaten Boalemo**

Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2016	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2018		
1	2		3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang												
	Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan												
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Jumlah Kontraktor Lokal yang mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa	25 Orang					Orang	Orang		Orang	
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD	Jumlah Kontraktor Lokal yang mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa	25 Orang					Orang	Orang		Orang	
			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah.	4 Laporan					4 Laporan	4 Laporan	4	Laporan	
	2	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) pelaksanaan kegiatan SOPD	4 Kegiatan					4 Kegiatan	4 Kegiatan	4	Kegiatan	
2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Presentase cakupan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100 %					100 %	100 %	100 %		
	1	Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan pelayanan umum kedinasan kepala daerah dalam satu tahun	12 Paket					12 Paket	12 Paket	12	Paket	
	2	Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah paket kebutuhan pelayanan umum kedinasan wakil kepala daerah dalam satu tahun	12 Paket					12 Paket	12 Paket	12	Paket	
	3	Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket kebutuhan pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala daerah	12 Paket					12 Paket	12 Paket	12	Paket	
	4	Pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket kebutuhan pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala daerah	12 Paket					12 Paket	12 Paket	12	Paket	

3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase jumlah penyelesaian laporan keuangan tepat waktu.	100 %					100 %	100 %	100 %	100 %
1	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah buku standar satuan harga barang dan jasa	75 Buku					70 Buku	70 Buku	70 Buku	70 Buku
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan Permasalahan Barang dan Jasa	0 Kasus					0 Kasus	0% Kasus	0% Kasus	0% Kasus
	Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan Permasalahan Barang dan Jasa	0 Kasus					0 Kasus	0% Kasus	0% Kasus	0% Kasus
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.	Persentase SOPD yang telah berakses internet.	100 %					100 %	100 %	100 %	100 %
1	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik.	Persentase SOPD yang telah berakses internet	100 %					100 %	100 %	100 %	100 %
6	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.	Persentase pengaduan masyarakat dibidang hukum yang tertangani	75 %					75 %	75 %	75 %	75 %
	Pemberian Bantuan Hukum	Jumlah korban yang memperoleh perlindungan bantuan hukum	1 Korban/Org					1 Korban/Org	1 Korban/Org	1 Korban/Org	1 Korban/Org
7	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah.	Persentase kerja sama antar pemerintah yang dilaksanakan dengan baik.	100 %					100 %	100 %	100 %	100 %
	Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah dan Lembaga Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Peningkatan kerja sama daerah dan lembaga pemerintah daerah.	2 Bentuk Kerja sama					- Bentuk Kerja sama	- Bentuk Kerja sama	- Bentuk Kerja sama	- Bentuk Kerja sama
8	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase rancangan produk yang dapat diselesaikan.	100 %					100 %	100 %	100 %	100 %
1	Koordinasi kerja sama permasalahan peraturan perundang-undangan.	Jumlah perda yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 Perda					5 Perda	5 Perda	5 Perda	5 Perda
		Jumlah perbup yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	50 Perbup					50 Perbup	50 Perbup	50 Perbup	50 Perbup
		Jumlah SK Bupati yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	400 SK Bupati					400 SK Bupati	400 SK Bupati	400 SK Bupati	400 SK Bupati
		Jumlah SK Sekda yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 SK Sekda					100 SK Sekda	100 SK Sekda	100 SK Sekda	100 SK Sekda
	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan					1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum terpadu dan Forum Diskusi Hukum	50 Orang					50 Org	50 Org	50 Org	50 Org

9	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>Nilai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4</b>	<b>Sangat Tinggi</b>						<b>2.6</b>	<b>Tinggi</b>	<b>2.6</b>	<b>Tinggi</b>	<b>2.6</b>	<b>Tinggi</b>
	1	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah.	Terselesainya batas wilayah antar daerah yang berbatasan.	3	Batas					3	Batas	3	Batas	3	Batas
	2	Fasilitasi penyusunan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD)	4	Sangat Tinggi					2.6	Tinggi	2.6	Tinggi	2.6	Tinggi
	3	Pelayanan Administrasi Terpadu	Terlaksananya Penerapan Pelayanan Administrasi terpadu disetiap kecamatan.	1	Kec					1	Kec	1	Kec	1	Kec
10	<b>Program Pelayanan Kedinasan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemanfaatan aset pemerintah daerah.</b>	<b>91</b>	<b>%</b>						<b>80</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>%</b>
		Pelayanan Kedinasan Kesekretariatan	Persentase pemanfaatan aset daerah.	91	%					91	%	91	%	91	%
11	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi tertata dengan baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>						<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
	1	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	12	Paket					12	Paket	12	Paket	12	Paket
	2	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah Paket kebutuhan pelayanan jasa administrasi keuangan.	12	Paket					12	Paket	12	Paket	12	Paket
	3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket kebutuhan pelayanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	12	Paket					12	Paket	12	Paket	12	Paket
12	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur.</b>	<b>75</b>	<b>%</b>						<b>75</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>%</b>
	1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah paket kebutuhan pelayanan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	12	Paket					12	Paket	12	Paket	12	Paket
	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah paket kebutuhan pelayanan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	Paket					12	Paket	12	Paket	12	Paket
	3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah paket kebutuhan pelayanan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12	Paket					12	Paket	12	Paket	12	Paket
13	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan.</b>	<b>75</b>	<b>%</b>						<b>75</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>%</b>
	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek pengadaan barang dan jasa	94	Orang					94	Orang	94	Orang	94	Orang
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan.</b>	<b>75</b>	<b>%</b>					<b>75</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>%</b>
	2	Kegiatan penguatan jiwa korps aparatur sipil negara	Jumlah kegiatan penguatan jiwa korps aparatur sipil negara	1	Keg					1	Keg	1	Keg	1	Keg
	3	Sosialisasi penguatan lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH)	Jumlah peserta sosialisasi penguatan lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH)	500	Orang					100	Orang	100	Orang	100	Orang
	4	Kegiatan Sosialisasi Kesejahteraan Bantuan Sosial Bagi Anggota Korpri	Jumlah peserta sosialisasi bantuan sosial bagi anggota korpri	500	Orang					100	Orang	100	Orang	100	Orang
	5	Kegiatan Pembinaan Mental Rohani Melalui Ceramah Agama Bagi Anggota Korpri	Jumlah Anggota korpri yang Ikut Pembinaan Mental Rohani.	500	Orang					100	Orang	100	Orang	100	Orang



14	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi</b>	<b>Jumlah pameran pembangunan yang diikuti.</b>	<b>4 Kegiatan</b>					<b>4 Kegiatan</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>4 Kegiatan</b>
	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran pembangunan yang diikuti	4 Kegiatan					4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
15	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>Persentase aparatur desa yang mendapatkan pelatihan dibidang pemerintahan desa.</b>	<b>60 %</b>					<b>60 %</b>	<b>60 %</b>	<b>60 %</b>	<b>60 %</b>
	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan administrasi desa yang dievaluasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	82 Laporan					82 Laporan	82 Laporan	82 Laporan	82 Laporan
	Penunjang kegiatan kinerja aparatur pemerintah desa	Jumlah kegiatan pemilihan kepala desa serentak secara e-voting.	1 kegiatan					1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
		Jumlah pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bentuk regulasi.	2 Peraturan					2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan
	Pelatihan aparat desa/BPD	Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan /bimtek tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.	82 Orang					82 Orang	82 Orang	82 Orang	82 Orang
16	<b>Program Kerja Sama Informasi dengan Mass Media</b>	<b>Jumlah berita yang termuat dalam media cetak dan elektronik.</b>	<b>360 Berita</b>					<b>300 Berita</b>	<b>300 Berita</b>	<b>300 Berita</b>	<b>300 Berita</b>
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah berita yang termuat dalam media cetak dan media elektronik.	360 Berita					300 Berita	300 Berita	300 Berita	300 Berita
17	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Persentase Penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan.</b>	<b>100 %</b>					<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah laporan hasil analisis jabatan SOPD dilingkungan pemerintah daerah	34 Laporan					34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan
	Penyusunan dan evaluasi standart pelayanan	Jumlah kegiatan penyusunan dan evaluasi standart pelayanan.	1 Kegiatan					1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
18	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>Persentase kegiatan adat daerah.</b>	<b>100 %</b>					<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
	1 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama dibidang budaya.	Jumlah kegiatan pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama dibidang budaya	3 Kegiatan					3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
19	<b>Program Pengembangan wawasan Kebangsaan</b>	<b>Presentase Perayaan hari-hari besar keagamaan.</b>	<b>100 %</b>					<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
	1 Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Jumlah Perayaan Hari- Hari Besar Keagamaan	10 Kegiatan					10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan
		<b>Persentase Sarana Peribadatan yang difasilitasi Stimulan.</b>	<b>25 %</b>					<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>

	20	Program kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan	Rasio jumlah Santri terhadap Usia Sekolah (Pendidikan Dasar Sembilan Tahun)	0.10	Rasio					Rasio		Rasio		Rasio
	1	Fasilitasi peapaian halaqah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.	Rasio jumlah Santri terhadap Usia Sekolah (Pendidikan Dasar Sembilan Tahun)	0.10	Rasio					Rasio		Rasio		Rasio

Boalemo, Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH**



**H.A. ETANGO**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650725 198801 1 002

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Boalemo**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO.**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2016 (thn n-2)	Tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (tnn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	Tahun 2016 (thn n-2)	Tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (tnn n)	Tahun 2019 (thn n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Jumlah Kontraktor Lokal yang mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa</b>		25 Orang		Orang	25 Orang	50 Orang		Orang	25 Orang	50 Orang
	Jumlah Kontraktor Lokal yang mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa		25 Orang		Orang	25 Orang	50 Orang		Orang	25 Orang	50 Orang
	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja perangkat daerah.		4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) pelaksanaan kegiatan SOPD		4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
	<b>Presentase cakupan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>		100 %		100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
	Jumlah paket kebutuhan pelayanan umum kedinasan kepala daerah dalam satu tahun		12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket
	Jumlah paket kebutuhan pelayanan umum kedinasan wakil kepala daerah dalam satu tahun		12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket
	Jumlah Paket kebutuhan pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala daerah		12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket
	Jumlah Paket kebutuhan pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala daerah		12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket
	<b>Presentase jumlah penyelesaian laporan keuangan tepat waktu.</b>		100 %		100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %

	Jumlah buku standar satuan harga barang dan jasa	75 Buku		70 Buku	75 Buku	75 Buku		70 Buku	75 Buku	75 Buku
	<b>Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	0 Kasus		4 Kali	0 Kasus	4 Kasus		4 Kali	0 Kasus	4 Kasus
	Jumlah Pengawasan internal secara berkala	0 Kasus		0 Kasus	0 Kasus	4 Kasus		0 Kasus	0 Kasus	4 Kasus
	<b>Persentase SOPD yang telah berakses internet.</b>	100 %		100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
	Presentase SOPD yang telah berakses internet	100 %		100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
	<b>Presentase pengaduan masyarakat dibiidang hukum yang tertangani</b>	75 %		75 %	75 %	80 %		75 %	75 %	80 %
	Jumlah korban yang memperoleh perlindungan bantuan hukum	1 Korban/Org		1 Korban/Org	1 Korban/Org	2 Korban/Org		1 Korban/Org	1 Korban/Org	2 Korban/Org
	<b>Persentase kerja sama antar pemerintah yang dilaksanakan dengan baik.</b>	100 %		100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
	Jumlah kegiatan Peningkatan kerja sama daerah dan lembaga pemerintah daerah.	2 Bentuk Kerja sama		- Bentuk Kerja sama	2 Bentuk Kerja sama	2 Bentuk Kerja sama		- Bentuk Kerja sama	2 Bentuk Kerja sama	2 Bentuk Kerja sama
	<b>Persentase rancangan produk yang dapat diselesaikan.</b>	100 %		100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
	Jumlah perda yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	`5 Perda		`5 Perda	`5 Perda	`5 Perda		`5 Perda	`5 Perda	`5 Perda
	Jumlah perbup yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	50 Perbup		50 Perbup	50 Perbup	50 Perbup		50 Perbup	50 Perbup	50 Perbup
	Jumlah SK Bupati yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	400 SK Bupati		400 SK Bupati	400 SK Bupati	400 SK Bupati		400 SK Bupati	400 SK Bupati	400 SK Bupati
	Jumlah SK Sekda yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 SK Sekda		100 SK Sekda	100 SK Sekda	100 SK Sekda		100 SK Sekda	100 SK Sekda	100 SK Sekda
	Jumlah kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum terpadu dan Forum Diskusi Hukum		50 Org		50 Org	50 Org	50 Org		50 Org	50 Org	50 Org
Nilai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		4 Sangat Tinggi		2.6 Tinggi	4 Sangat Tinggi	4 Sangat Tinggi		2.6 Tinggi	4 Sangat Tinggi	4 Sangat Tinggi
Terselesainya batas wilayah antar daerah yang berbatasan.		3 Batas		3 Batas	3 Batas	3 Batas		3 Batas	3 Batas	3 Batas
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD)		4 Sangat Tinggi		2.6 Tinggi	4 Sangat Tinggi	4 Sangat Tinggi		2.6 Tinggi	4 Sangat Tinggi	4 Sangat Tinggi
Terlaksananya Penerapan Pelayanan Administrasi terpadu disetiap kecamatan.		1 Kec		1 Kec	1 Kec	1 Kec		1 Kec	1 Kec	1 Kec
<b>Persentase pemanfaatan aset pemerintah daerah.</b>		91 %		91 %	91 %	92 %		91 %	91 %	92 %
Persentase pemanfaatan aset daerah.		91 %		91 %	91 %	92 %		91 %	91 %	92 %
<b>Persentase administrasi tertata dengan baik</b>		100 %		100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
Jumlah Paket kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.		12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket
Jumlah Paket kebutuhan pelayanan jasa administrasi keuangan.		12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket
Jumlah Paket kebutuhan pelayanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.		12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket
<b>Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur.</b>		75 %		75 %	75 %	75 %		75 %	75 %	75 %
Jumlah paket kebutuhan pelayanan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket
Jumlah paket kebutuhan pelayanan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket

Jumlah paket kebutuhan pelayanan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket
<b>Persentase aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan.</b>		75 %		75 %	75 %	80 %		75 %	75 %	80 %
Jumlah peserta bimtek pengadaan barang dan jasa		94 Orang		94 Orang	94 Orang	97 Orang		94 Orang	94 Orang	97 Orang
<b>Persentase aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan.</b>		75 %		75 %	75 %	80 %		75 %	75 %	80 %
Jumlah kegiatan penguatan jiwa korps aparatur sipil negara		1 Keg		1 Keg	1 Keg	1 Keg		1 Keg	1 Keg	1 Keg
Jumlah peserta sosialisasi penguatan lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH)		500 Orang		100 Orang	500 Orang	500 Orang		100 Orang	500 Orang	500 Orang
Jumlah peserta sosialisasi bantuan sosial bagi anggota korpri		500 Orang		100 Orang	500 Orang	500 Orang		100 Orang	500 Orang	500 Orang
Jumlah Anggota korpri yang Ikut Pembinaan Mental Rohani.		500 Orang		100 Orang	500 Orang	500 Orang		100 Orang	500 Orang	500 Orang
<b>Jumlah pameran pembangunan yang diikuti.</b>		4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
Jumlah pameran pembangunan yang diikuti		4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
<b>Persentase aparatur desa yang mendapatkan pelatihan dibidang pemerintahan desa.</b>		60 %		60 %	60 %	65 %		60 %	60 %	65 %
Jumlah laporan administrasi desa yang dievaluasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku		82 Laporan		82 Laporan	82 Laporan	82 Laporan		82 Laporan	82 Laporan	82 Laporan
Jumlah kegiatan pemilihan kepala desa serentak secara e-voting.		1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
Jumlah pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bentuk regulasi.		2 Peraturan		2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan		2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan
Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan /bimtek tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.		82 Orang		82 Orang	82 Orang	82 Orang		82 Orang	82 Orang	82 Orang



	<b>Jumlah berita yang termuat dalam media cetak dan elektronik.</b>		360 Berita		300 Berita	360 Berita	360 Berita		300 Berita	360 Berita	360 Berita
	Jumlah berita yang termuat dalam media cetak dan media elektronik.		360 Berita		300 Berita	360 Berita	360 Berita		300 Berita	360 Berita	360 Berita
	<b>Persentase Penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan.</b>		100 %		100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
	Jumlah laporan hasil analisis jabatan SOPD dilingkungan pemerintah daerah		34 Laporan		34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan		34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan
	Jumlah kegiatan penyusunan dan evaluasi standart pelayanan.		1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	<b>Persentase kegiatan adat daerah.</b>		100 %		100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
	Jumlah kegiatan pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama dibidang budaya		3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
	<b>Presentase Perayaan hari-hari besar keagamaan.</b>		100 %		100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
	Jumlah Perayaan Hari- Hari Besar Keagamaan		10 Kegiatan		10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan		10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan
	<b>Persentase Sarana Peribadatan yang difasilitasi Stimulan.</b>		25 %		%	25 %	30 %		%	25 %	30 %
	<b>Rasio jumlah Santri terhadap Usia Sekolah (Pendidikan Dasar Sembilan Tahun)</b>		0.10 Rasio		Rasio	0.10 Rasio	0.15 Rasio		Rasio	0.10 Rasio	0.15 Rasio
	Rasio jumlah Santri terhadap Usia Sekolah (Pendidikan Dasar Sembilan Tahun))		0.10 Rasio		Rasio	0.10 Rasio	0.15 Rasio		Rasio	0.10 Rasio	0.15 Rasio

Boalemo, Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH**



**H.A ETANGO**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650725 198801 1 002

**Tabel T-C.31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018**  
**Kabupaten Boalemo**

Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	6	7	8		5	6	7	8		13
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan					
	Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan					Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan					
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Jumlah Kontraktor Lokal yang mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa	25 Orang	150,450,000	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Kontraktor Lokal yang mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa	25 Orang	760,250,000	
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD	Jumlah Kontraktor Lokal yang mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa	25 Orang	75,225,000	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD	Jumlah Kontraktor Lokal yang mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa	25 Orang	316,500,000	
			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah.	4 Laporan				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah.	4 Laporan		
	2	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) pelaksanaan kegiatan SOPD	4 Kegiatan	75,225,000	2	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) pelaksanaan kegiatan SOPD	4 Kegiatan	443,750,000	

	2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			Presentase cakupan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100	%	6,258,750,000	2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			Presentase cakupan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100	%	6,038,100,000	
		1	Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah		Jumlah paket kebutuhan pelayanan umum kedinasan kepala daerah dalam satu tahun	12	Paket	1,564,687,500		1	Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah		Jumlah paket kebutuhan pelayanan umum kedinasan kepala daerah dalam satu tahun	12	Paket	1,439,000,000	
		2	Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Kepala Daerah.		Jumlah paket kebutuhan pelayanan umum kedinasan wakil kepala daerah dalam satu tahun	12	Paket	1,173,515,000		2	Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Kepala Daerah.		Jumlah paket kebutuhan pelayanan umum kedinasan wakil kepala daerah dalam satu tahun	12	Paket	1,115,000,000	
		3	Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket kebutuhan pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala daerah	12	Paket	1,936,301,000		3	Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket kebutuhan pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala daerah	12	Paket	1,925,000,000	
		4	Pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket kebutuhan pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala daerah	12	Paket	1,584,246,500		4	Pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket kebutuhan pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala daerah	12	Paket	1,559,100,000	

3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase jumlah penyelesaian laporan keuangan tepat waktu.	100	%	179,960,000	3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase jumlah penyelesaian laporan keuangan tepat waktu.	100	%	137,500,000	
	1 Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah buku standar satuan harga barang dan jasa	75	Buku	89,980,000		1 Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah buku standar satuan harga barang dan jasa	75	Buku	137,500,000	
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan Permasalahan Barang dan Jasa	0	Kasus	89,980,000	4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan Permasalahan Barang dan Jasa	0	Kasus	420,500,000	
	Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan Permasalahan Barang dan Jasa	0	Kasus	67,890,000		Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan Permasalahan Barang dan Jasa	0	Kasus	420,500,000	
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.	Persentase SOPD yang telah berakses internet.	100	%	33,945,000	5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.	Persentase SOPD yang telah berakses internet.	100	%	638,800,000	
	1 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik.	Presentase SOPD yang telah berakses internet	100	%	33,945,000		1 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik.	Presentase SOPD yang telah berakses internet	100	%	638,800,000	
6	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.	Presentase pengaduan masyarakat dibidang hukum yang tertangani	75	%	1,129,680,000	6	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.	Presentase pengaduan masyarakat dibidang hukum yang tertangani	75	%	330,000,000	
	Pemberian Bantuan Hukum	Jumlah korban yang memperoleh perlindungan bantuan hukum	1	Korban/Org	1,129,680,000		Pemberian Bantuan Hukum	Jumlah korban yang memperoleh perlindungan bantuan hukum	1	Korban/Org	330,000,000	

7	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah.	Persentase kerja sama antar pemerintah yang dilaksanakan dengan baik.	100	%	250,390,000	7	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah.	Persentase kerja sama antar pemerintah yang dilaksanakan dengan baik.	100	%	142,500,000	
	Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah dan Lembaga Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Peningkatan kerja sama daerah dan lembaga pemerintah daerah.	2	Bentuk Kerja sama	250,390,000		Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah dan Lembaga Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Peningkatan kerja sama daerah dan lembaga pemerintah daerah.	2	Bentuk Kerja sama	142,500,000	
8	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase rancangan produk yang dapat diselesaikan.	100	%	435,890,000	8	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase rancangan produk yang dapat diselesaikan.	100	%	631,164,000	
	1 Koordinasi kerja sama permasalahan peraturan perundang-undangan.	Jumlah perda yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5	Perda	237,993,000		1 Koordinasi kerja sama permasalahan peraturan perundang-undangan.	Jumlah perda yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5	Perda	246,799,000	
		Jumlah perpup yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	50	Perpup				Jumlah perpup yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	50	Perpup		
		Jumlah SK Bupati yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	400	SK Bupati				Jumlah SK Bupati yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	400	SK Bupati		
		Jumlah SK Sekda yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	SK Sekda				Jumlah SK Sekda yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	SK Sekda		

	2	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	1	Kegiatan	211,550,000		Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	1	Kegiatan	277,900,000	
	3	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum terpadu dan Forum Diskusi Hukum	50	Org	158,662,000		Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum terpadu dan Forum Diskusi Hukum	50	Org	106,465,000	
9	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		Nilai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4	Sangat Tinggi	812,760,000	9	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Nilai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4	Sangat Tinggi	685,000,000	
	1	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah.	Terselesainya batas wilayah antar daerah yang berbatasan.	3	Batas	270,920,000	1	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah.	Terselesainya batas wilayah antar daerah yang berbatasan.	3	Batas	130,600,000	
	2	Fasilitasi penyusunan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD)	4	Sangat Tinggi	270,920,000	2	Fasilitasi penyusunan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD)	4	Sangat Tinggi	406,700,000	
	3	Pelayanan Administrasi Terpadu	Terlaksananya Penerapan Pelayanan Administrasi terpadu disetiap kecamatan.	1	Kec	270,920,000	3	Pelayanan Administrasi Terpadu	Terlaksananya Penerapan Pelayanan Administrasi terpadu disetiap kecamatan.	1	Kec	147,700,000	
10	Program Pelayanan Kedinasan Pemerintah Daerah		Persentase pemanfaatan aset pemerintah daerah.	91	%	4,613,980,000	10	Program Pelayanan Kedinasan Pemerintah Daerah	Persentase pemanfaatan aset pemerintah daerah.	91	%	3,879,400,000	
		Pelayanan Kedinasan Kesekretariatan	Persentase pemanfaatan aset daerah.	91	%	4,613,980,000		Pelayanan Kedinasan Kesekretariatan	Persentase pemanfaatan aset daerah.	91	%	3,879,400,000	



11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase administrasi tertata dengan baik	100	%	798,340,000	11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase administrasi tertata dengan baik	100	%	2,945,100,000
	1	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	12	Paket	199,585,000		1	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	12	Paket	1,179,700,000
	2	Penyediaan Jasa administrasi keuangan		Jumlah Paket kebutuhan pelayanan jasa administrasi keuangan.	12	Paket	119,751,000		2	Penyediaan Jasa administrasi keuangan		Jumlah Paket kebutuhan pelayanan jasa administrasi keuangan.	12	Paket	975,000,000
	3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket kebutuhan pelayanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	12	Paket	159,668,000		3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket kebutuhan pelayanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	12	Paket	790,400,000
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur.	75	%	450,490,000	12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur.	75	%	1,629,900,000
	1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Jumlah paket kebutuhan pelayanan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	12	Paket	135,147,000		1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Jumlah paket kebutuhan pelayanan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	12	Paket	518,400,000
	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah paket kebutuhan pelayanan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	Paket	135,147,000		2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah paket kebutuhan pelayanan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	Paket	600,000,000
	3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		Jumlah paket kebutuhan pelayanan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12	Paket	180,196,000		3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		Jumlah paket kebutuhan pelayanan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12	Paket	511,500,000

13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan.	75	%	373,850,000	13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan .	75	%	571,700,000	
	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek pengadaan barang dang jasa	94	Orang	93,462,000		1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek pengadaan barang dang jasa	94	Orang	440,700,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan.	75	%	84,116,000		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan .	75	%	500,000,000	
	2	Kegiatan penguatan jiwa korps aparatur sipil negara	Jumlah kegiatan penguatan jiwa korps aparatur sipil negara	1	Keg	78,508,000		2	Kegiatan penguatan jiwa korps aparatur sipil negara	Jumlah kegiatan penguatan jiwa korps aparatur sipil negara	1	Keg	216,700,000	
	3	Sosialisasi penguatan lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH)	Jumlah peserta sosialisasi penguatan lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH)	500	Orang	76,546,000		3	Sosialisasi penguatan lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH)	Jumlah peserta sosialisasi penguatan lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH)	500	Orang	94,150,000	
	4	Kegiatan Sosialisasi Kesejahteraan Bantuan Sosial Bagi Anggota Korpri	Jumlah peserta sosialisasi bantuan sosial bagi anggota korpri	500	Orang	41,218,000		4	Kegiatan Sosialisasi Kesejahteraan Bantuan Sosial Bagi Anggota Korpri	Jumlah peserta sosialisasi bantuan sosial bagi anggota korpri	500	Orang	167,190,000	
	5	Kegiatan Pembinaan Mental Rohani Melalui Ceramah Agama Bagi Anggota Korpri	Jumlah Anggota korpri yang Ikut Pembinaan Mental Rohani.	500	Orang	85,500,000		5	Kegiatan Pembinaan Mental Rohani Melalui Ceramah Agama Bagi Anggota Korpri	Jumlah Anggota korpri yang ikut Pembinaan Mental Rohani.	500	Orang	21,960,000	

14	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	Jumlah pameran pembangunan yang diikuti.	4	Kegiatan	85,500,000	14	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	Jumlah pameran pembangunan yang diikuti.	4	Kegiatan	102,250,000	
	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran pembangunan yang diikuti	4	Kegiatan	85,500,000		Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran pembangunan yang diikuti	4	Kegiatan	102,250,000	
15	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur desa yang mendapatkan pelatihan dibidang pemerintahan desa.	60	%	85,500,000	15	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur desa yang mendapatkan pelatihan dibidang pemerintahan desa.	60	%	672,500,000	
	1 Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan administrasi desa yang dievaluasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	82	Laporan	539,800,000		Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan administrasi desa yang dievaluasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	82	Laporan	242,000,000	
	2 Penunjang kegiatan kinerja aparatur pemerintah desa	Jumlah kegiatan pemilihan kepala desa serentak secara e-voting.	1	kegiatan	215,920,000		Penunjang kegiatan kinerja aparatur pemerintah desa	Jumlah kegiatan pemilihan kepala desa serentak secara e-voting.	1	kegiatan	131,600,000	
		Jumlah pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bentuk regulasi.	2	Peraturan	123,074,000			Jumlah pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bentuk regulasi.	2	Peraturan		
	3 Pelatihan aparat desa/BPD	Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan /bimtek tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.	82	Orang	200,806,000		Pelatihan aparat desa/BPD	Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan /bimtek tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.	82	Orang	131,600,000	

16	Program Kerja Sama Informasi dengan Mass Media		Jumlah berita yang termuat dalam media cetak dan elektronik.	360	Berita	1,258,870,000	16	Program Kerja Sama Informasi dengan Mass Media		Jumlah berita yang termuat dalam media cetak dan elektronik.	360	Berita	3,557,500,000	
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah		Jumlah berita yang termuat dalam media cetak dan media elektronik.	360	Berita	1,258,870,000		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah		Jumlah berita yang termuat dalam media cetak dan media elektronik.	360	Berita	3,557,500,000	
17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Persentase Penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan.	100	%	76,890,000	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Persentase Penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan.	100	%	138,836,000	
	1 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS		Jumlah laporan hasil analisis jabatan SOPD dilingkungan	34	Laporan	38,445,000		Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS		Jumlah laporan hasil analisis jabatan SOPD	34	Laporan	138,836,000	
	2 Penyusunan dan evaluasi standart pelayanan		Jumlah kegiatan penyusunan dan evaluasi standart pelayanan.	1	Kegiatan	38,445,000		Penyusunan dan evaluasi standart pelayanan		Jumlah kegiatan penyusunan dan evaluasi standart pelayanan.	1	Kegiatan	15,836,000	
18	Program Pengembangan Nilai Budaya		Persentase kegiatan adat daerah.	100	%	181,971,000	18	Program Pengembangan Nilai Budaya		Persentase kegiatan adat daerah.	100	%	623,700,000	
	1 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama dibidang budaya.		Jumlah kegiatan pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama dibidang budaya	3	Kegiatan	181,971,000		1 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama dibidang budaya.		Jumlah kegiatan pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama dibidang budaya	3	Kegiatan	623,700,000	
19	Program Pengembangan wawasan Kebangsaan		Presentase Perayaan hari-hari besar keagamaan.	100	%	978,820,000	19	Program Pengembangan wawasan Kebangsaan		Presentase Perayaan hari-hari besar keagamaan.	100	%	1,496,300,000	
	1 Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama		Jumlah Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan	10	Kegiatan	978,820,000		1 Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama		Jumlah Perayaan Hari- Hari Besar Keagamaan	10	Kegiatan	1,496,300,000	
			Persentase Sarana Peribadatan yang difasilitasi Stimulan.	25	%					Persentase Sarana Peribadatan yang difasilitasi Stimulan.	25	%		

20	Program kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan	Rasio jumlah Santri terhadap Usia Sekolah (Pendidikan Dasar Sembilan Tahun)	0.10	Rasio	20	Program kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan	Rasio jumlah Santri terhadap Usia Sekolah (Pendidikan Dasar Sembilan Tahun)	0.10	Rasio
1	Fasilitasi peapaian halaqah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.	Rasio jumlah Santri terhadap Usia Sekolah (Pendidikan Dasar Sembilan Tahun))	0.10	Rasio	1	Fasilitasi peapaian halaqah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.	Rasio jumlah Santri terhadap Usia Sekolah (Pendidikan Dasar Sembilan Tahun)	0.10	Rasio
2	Fasilitasi peapaian halaqah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.								

Boalemo, Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**H.A. ETANGO**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19650725 198801 1 002

**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018**  
**Kabupaten Boalemo Gorontalo**

Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan Penting	Ket
1	2	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					
	Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan					
						Tidak ada usuan

Boalemo, Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH**



**H.A. ETANGO**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650725 198801 1 002

**Tabel T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2019**  
**Kabupaten Boalemo**

Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan											
MISI I : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG DAMAI											
	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Kontraktor Lokal yang mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa		25	Orang	150,450,000	APBD		50 Orang	180,670
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah.		4	Laporan	75,225,000			4 Laporan	90,335,000
	2	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) pelaksanaan kegiatan SOPD		4	Kegiatan	75,225,000			4 kegiatan	90335000
	2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Presentase cakupan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		100	%	6,258,750,000			100 %	628,505,000
	1	Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan pelayanan umum kedinasan kepala daerah dalam satu tahun		12	Paket	1,564,687,500			12 Paket	1,571,262,500
	2	Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah paket kebutuhan pelayanan umum kedinasan wakil kepala daerah dalam satu tahun		12	Paket	1,173,515,000			12 Paket	1,178,446,000
	3	Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket kebutuhan pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala daerah		12	Paket	1,936,301,000			12 Paket	1,944,437,000
	4	Pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket kebutuhan pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		12	Paket	1,584,246,500			12 Paket	1,590,904,500

3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase jumlah penyelesaian laporan keuangan tepat waktu.	100	%	179,960,000		100	%	205,000,000
1	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah buku standar satuan harga barang dan jasa	75	Buku	89,980,000		75	buku	102,500,000
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan Permasalahan Barang dan Jasa	0	Kasus	89,980,000		0	Kasus	92,900,000
1	Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan Permasalahan Barang dan Jasa	0	Kasus	67,890,000		0	Kasus	92,900,000
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.	Persentase SOPD yang telah berakses internet.	100	%	33,945,000		100%	%	1,155,750,000
1	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik.	Persentase SOPD yang telah berakses internet	100	%	33,945,000		100	%	1,155,750,000
6	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.	Persentase pengaduan masyarakat dibidang hukum yang tertangani	75	%	1,129,680,000		80	%	275,350,000
1	Pemberian Bantuan Hukum	Jumlah korban yang memperoleh perlindungan bantuan hukum	1	Korban/Org	1,129,680,000		2	Korban	275,350,000
7	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah.	Persentase kerja sama antar pemerintah yang dilaksanakan dengan baik.	100	%	250,390,000		100	%	460,900,000
	Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah dan Lembaga Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Peningkatan kerja sama daerah dan lembaga pemerintah daerah.	2	Bentuk Kerja sama	250,390,000		2	Kerja Sama	276,540,000
8	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase rancangan produk yang dapat diselesaikan.	100	%	435,890,000		100	%	748,000,000
1	Koordinasi kerja sama permasalahan peraturan perundang-undangan.	Jumlah perda yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5	Perda	237,993,000		5	Perda	249,333,000
		Jumlah perbup yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	50	Perbup			50	Perbup	
		Jumlah SK Bupati yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	400	SK Bupati			400	SK Bupati	
		Jumlah SK Sekda yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	SK Sekda			100	SK Sekda	



	2	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	1	Kegiatan	211,550,000		1	Kegiatan	221,630,000
	3	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum terpadu dan Forum Diskusi Hukum	50	Org	158,662,000		50	Org	166,222,000
9	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>		<b>Nilai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	4	Sangat Tinggi	812,760,000		4	Sangat Tinggi	838,250,000
	1	Facilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah.	Terselesainya batas wilayah antar daerah yang berbatasan.	3	Batas	270,920,000		3	Batas	187,000,000
	2	Facilitasi penyusunan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD)	4	Sangat Tinggi	270,920,000		4	Sangat Tinggi	187,000,000
	3	Pelayanan Administrasi Terpadu	Terlaksananya Penerapan Pelayanan Administrasi terpadu di setiap kecamatan.	1	Kec	270,920,000		1	Kec.	187,000,000
10	<b>Program Pelayanan Kedinasan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase pemanfaatan aset pemerintah daerah.</b>	91	%	4,613,980,000		92	%	4,630,000,000
	1	Pelayanan Kedinasan Kesekretariatan	Persentase pemanfaatan aset daerah.	91	%	4,613,980,000		92	%	4,630,000,000
11	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase administrasi tertata dengan baik</b>	100	%	798,340,000		100	%	824,760,000
	1	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	12	Paket	199,585,000		12	Paket	206,190,000
	2	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah Paket kebutuhan pelayanan jasa administrasi keuangan.	12	Paket	119,751,000		12	Paket	123,714,000
	3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket kebutuhan pelayanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	12	Paket	159,668,000		12	Paket	98,971,000
12	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur.</b>	75	%	450,490,000		80	%	478,370,000
	1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah paket kebutuhan pelayanan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	12	Paket	135,147,000		12	Paket	143,511,000

		2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah paket kebutuhan pelayanan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	Paket	135,147,000			12	Paket	143,511,000
		3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah paket kebutuhan pelayanan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12	Paket	180,196,000			12	Paket	191,348,000
	13	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan.</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>373,850,000</b>			<b>80</b>	<b>%</b>	<b>399,000,000</b>
		1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek pengadaan barang dan jasa	94	Orang	93,462,000			97	Orang	99,750,000
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan.</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>84,116,000</b>			<b>75</b>	<b>%</b>	
		2	Kegiatan penguatan jiwa korps aparatur sipil negara	Jumlah kegiatan penguatan jiwa korps aparatur sipil negara	1	Keg	78,508,000			1	Keg	<b>89,775,000</b>
		3	Sosialisasi penguatan lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH)	Jumlah peserta sosialisasi penguatan lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH)	500	Orang	76,546,000			500	Orang	83,790,000
		4	Kegiatan Sosialisasi Kesejahteraan Bantuan Sosial Bagi Anggota Korpri	Jumlah peserta sosialisasi bantuan sosial bagi anggota korpri	500	Orang	41,218,000			500	Orang	81,695,000
		5	Kegiatan Pembinaan Mental Rohani Melalui Ceramah Agama Bagi Anggota Korpri	Jumlah Anggota korpri yang ikut Pembinaan Mental Rohani.	500	Orang	85,500,000			500	Orang	43,990,000
	14	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi</b>		<b>Jumlah pameran pembangunan yang diikuti.</b>	<b>4</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>85,500,000</b>			<b>4</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>110,550,000</b>
		1	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran pembangunan yang diikuti	4	Kegiatan	85,500,000			4	Kegiatan	110,550,000
	15	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>		<b>Persentase aparatur desa yang mendapatkan pelatihan dibidang pemerintahan desa.</b>	<b>60</b>	<b>%</b>	<b>539,800,000</b>			<b>65</b>	<b>%</b>	<b>567,900,000</b>
		1	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan administrasi desa yang dievaluasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	82	Laporan	215,920,000			82	Laporan	227,160,000

		2	Penunjang kegiatan kinerja aparatur pemerintah desa	Jumlah kegiatan pemilihan kepala desa serentak secara e-voting.	1	kegiatan	123,074,000		1	kegiatan	129,481,000
				Jumlah pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bentuk peraturan	2	Peraturan			2	Peraturan	
		3	Pelatihan aparat desa/BPD	Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan /bimtek tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	82	Orang	200,806,000		82	Orang	211,259,000
	16	<b>Program Kerja Sama Informasi dengan Mass Media</b>		<b>Jumlah berita yang termuat dalam media cetak dan elektronik.</b>	<b>360</b>	<b>Berita</b>	<b>1,258,870,000</b>		<b>360</b>	<b>Berita</b>	<b>1,376,870,000</b>
		1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah berita yang termuat dalam media cetak dan media elektronik.	360	Berita	1,258,870,000		360	Berita	1,376,870,000
	17	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>		<b>Persentase Penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan.</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>76,890,000</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>105,250,000</b>
		1	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah laporan hasil analisis jabatan SOPD dilingkungan pemerintah daerah	34	Laporan	38,445,000		34	Laporan	52,625,000
		2	Penyusunan dan evaluasi standart pelayanan	Jumlah kegiatan penyusunan dan evaluasi standart pelayanan.	1	Kegiatan	38,445,000		1	Kegiatan	52,625,000
	18	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>		<b>Persentase kegiatan adat daerah.</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>181,971,000</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>193,275,000</b>
		1	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama dibidang budaya.	Jumlah kegiatan pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama dibidang budaya	3	Kegiatan	181,971,000		3	Kegiatan	193,275,000
	19	<b>Program Pengembangan wawasan Kebangsaan</b>		<b>Presentase Perayaan hari-hari besar keagamaan.</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>978,820,000</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,060,180,000</b>
		1	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Jumlah Perayaan Hari- Hari Besar Keagamaan	10	Kegiatan	978,820,000		10	Kegiatan	1,060,180,000
				Persentase Sarana Peribadatan yang difasilitasi Stimulan.	25	%			25	%	

	20	Program kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan	Rasio jumlah Santri terhadap Usia Sekolah (Pendidikan Dasar Sembilan Tahun)		0.10	Rasio				0.10	Rasio	
	1	Fasilitasi peapaian halaqah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.	Rasio jumlah Santri terhadap Usia Sekolah (Pendidikan Dasar Sembilan Tahun))		0.10	Rasio				0.10	Rasio	

Boalemo, Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH**



**H.A. ETANGO**

**Pembina Utama Madya**

NIP. 19650725 198801 1 002